

## **BAB II**

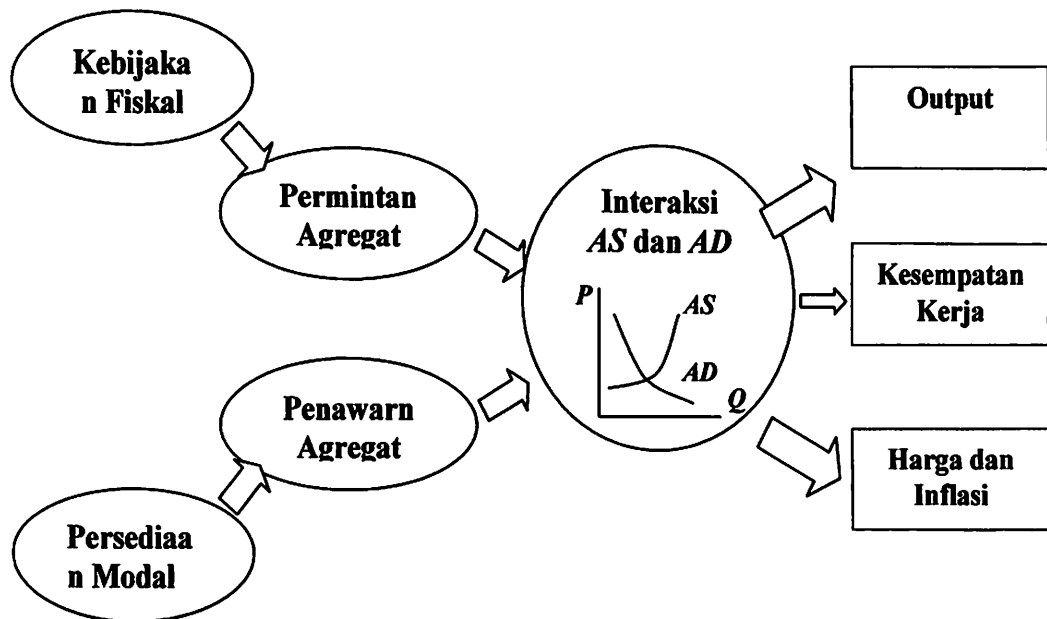
### **LANDASAN TEORI**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan berdasarkan pendekatan fiskal dan tingkat keterbukaan perekonomian. Teori fiskal tidak hanya membahas aspek yang terdapat di dalam anggaran pemerintah, akan tetapi juga menerangkan pengaruh anggaran fiskal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Instrumen fiskal seperti pajak maupun transfer pemerintah tidak hanya dirancang untuk sebagai stabilisator perekonomian, akan tetapi juga memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbukaan perekonomian di suatu wilayah juga dianggap sebagai salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas perdagangan berupa keluar dan masuknya barang dan jasa di wilayah tersebut. Pada bab ini akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendekatan fiskal dan tingkat keterbukaan perekonomian.

#### **2.1. Teori Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui fungsinya berupa alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 322-323). Sasaran kebijakan fiskal difokuskan pada upaya untuk mempengaruhi permintaan agregat. Pada Gambar 2.1, permintaan agregat (AD) akan berinteraksi dengan penawaran agregat (AS) melalui mekanisme pasar. Koreksi atas permintaan agregat akan direspon oleh sisi penawaran yang

selanjutnya akan mempengaruhi seberapa besar output keseimbangan. Interaksi antara permintaan agregat yang telah dikoreksi oleh kebijakan fiskal dan penawaran agregat akan menghasilkan bentuk baru dari harga keseimbangan, tingkat kesempatan kerja, dan pembentukan harga dan inflasi.



**Gambar 2.1**  
**Dampak Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian**

Sumber: Samuelson dan Nordhaus (1992: 345)

## 2.2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Campur tangan pemerintah dalam perekonomian dilegitimasi sebagai identitas keseimbangan pendapatan nasional oleh kelompok pemikiran *Keynesian* (Dumairy, 1996: 161). Dengan menggunakan persamaan dasar dari pendapatan nasional ditunjukkan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah ( $G$ ) berkorelasi secara positif dengan pendapatan nasional seperti yang ditunjukkan pada persamaan (2.1).

orang sebagai organisme selalu mengalami perkembangan, maka negara juga dianggap sebagai organisme yang juga selalu berkembang.

- 2) Tidak memperhitungkan pengaruh perang terhadap pengeluaran negara.
- 3) Hukum *Wagner* hanya memfokuskan pada periodisasi waktu jangka panjang sehingga kurang memperhatikan pola waktu atau proses perkembangan pengeluaran negara tersebut.

Teori utama dari *Peacock* dan *Wiseman* didasarkan pada tingkat toleransi pajak yang merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan besarnya pemungutan atas pajak (Guritno, 1996: 173). Apabila terdapat faktor-faktor yang dapat mengganggu perekonomian seperti perang, bencana alam, dan kondisi-kondisi lainnya, maka akan menyebabkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya. Hal ini juga harus didukung dengan meningkatkan penerimaan anggaran terutama dari sistem perpajakan. Berdasarkan kondisi tersebut, perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak menjadi semakin meningkat di mana pada waktu yang sama tarif pajak tidak berubah. Peningkatan tersebut akan memberikan dorongan pada peningkatan pengeluaran pemerintah.

### **2.3. Teori Pajak**

#### **2.3.1. Pengertian Pajak**

Pengertian dasar dari penerimaan pajak (*tax revenue*) adalah suatu pungutan yang dipaksakan kepada subyek pajak oleh pemerintah untuk berbagai tujuan seperti membiayai penyediaan barang dan jasa publik, regulator perekonomian, dan dapat berfungsi sebagai komponen kebijakan untuk mengatur

konsumsi (Mangkoesoebroto, 1993: 233). Sebagai bagian dari tujuan kebijakan fiskal, penerimaan pajak di atur sepenuhnya berdasarkan undang-undang dan tidak ada balas jasa atau kontraprestasi yang langsung dapat ditujukan penggunaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak atau penerimaan pajak merupakan akibat dari adanya aktivitas pemerintah yang ditujukan untuk mempengaruhi siklus bisnis dalam suatu perekonomian.

Pada pendekatan asumsi anggaran berimbang, besarnya perubahan penerimaan pemerintah dipengaruhi oleh respon subyek yang dikenakan pajak. Faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja akan memberikan reaksi untuk mencapai bentuk fungsi keseimbangannya masing-masing seperti menurunnya produktivitas dan pengurangan tingkat konsumsi. Ini berarti besarnya penerimaan pajak ditentukan oleh adanya perubahan dari aspek-aspek ekonomi di masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, ciri-ciri dari bentuk kebijakan di bidang perpajakan dapat diterangkan sebagai berikut (Waluyo dan Wirawan, 2002 : 5-6):

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment

- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

### **2.3.2 Pajak Daerah**

Pajak seperti dijadikan sebagai salah satu variabel penelitian di sini adalah jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang selanjutnya diperbaharui dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, anggaran penerimaan daerah terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pinjaman Daerah
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah atau PAD mencerminkan kemandirian keuangan daerah, yaitu kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya dari sumber-sumber pendapatan di daerah tersebut (Suparmoko, 2002: 49). Ini berarti PAD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan di daerahnya termasuk kegiatan pembangunan di daerah. Hal ini disebutkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 di mana sumber penerimaan daerah yang terdapat pada PAD adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam UU No. 34 Tahun 2000 ini diterangkan pula bahwa daerah tingkat kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber penerimaannya.

Pos pendapatan daerah yang terdapat pada PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah dinyatakan sebagai sumber utama penerimaan daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan termasuk pendanaan pembangunan di daerah (Suparmoko, 2002: 55-56). Pajak daerah dan retribusi daerah adalah jenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di mana dalam pelaksanaannya di atur berdasarkan peraturan daerah. Perbedaan antara keduanya terletak pada aspek balas jasa yang diterima. Apabila pada pajak daerah, balas jasa tidak dapat diberikan secara langsung, maka untuk retribusi, balas jasa dapat diberikan secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha/hukum kepada pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana hasil pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, pajak daerah dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak pemerintah daerah propinsi dan pajak pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Perbedaan ini didasarkan pada pihak yang memungutnya dan jenis-jenis pajak yang dipungut. Prakosa (2003: 3-4) menerangkan bahwa perbedaan pajak daerah ini berdasarkan wilayah/daerah pemungutnya dan batas wewenang yang diotorisasikan berdasarkan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku. Pada prinsipnya, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 lebih berorientasi untuk mendorong penerimaan pajak daerah yang berasal dari pihak pemerintah daerah

Kabupaten/Kota. Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, pemerintah daerah Propinsi hanya berwenang untuk mengkoordinasikan anggaran di tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi tidak berwenang dalam mengatur penanganan keuangan di tingkat Kabupaten/Kota.

**Tabel 2.2**

**Komposisi Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 Untuk Daerah Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota**

<b>Tingkat Propinsi</b>	<b>Tingkat Kabupaten/Kota</b>
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	1. Pajak Hotel
2. Bea Balik Nama untuk Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air	2. Pajak Restoran
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah (ABT) dan Air Permukaan (AP)	4. Pajak Reklame
	5. Pajak Penerangan Jalan
	6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
	7. Pajak Parkir

Sumber: Suparmoko (2002: 60-61).

Penetapan jenis pajak daerah untuk pemerintah daerah tingkat propinsi dan kabupaten/kota ditujukan untuk menghindari adanya konflik pendapatan di antara pemerintah daerah. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 menetapkan secara jelas pajak daerah yang menjadi hak pemerintah propinsi dan pajak daerah yang menjadi hak pemerintah kabupaten/kota. Pada pelaksanaannya, pajak daerah yang pelaksanaannya di atur melalui peraturan daerah (perda) diberlakukan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Pelaksanaan pajak daerah berdasarkan perda tersebut juga bersifat fleksibel. Artinya, pemerintah daerah di tingkat propinsi dapat bekerjasama untuk melakukan pengelolaan pajak daerah dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

## **2.4. Tingkat Keterbukaan Perekonomian**

Suatu negara dikatakan memiliki bentuk perekonomian terbuka apabila negara tersebut telah melakukan pertukaran baik barang maupun jasa dengan negara lainnya. Bentuk pertukaran dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengirimkan barang atau pun jasa dari negara tersebut ke negara lain (ekspor) dan mendatangkan barang ataupun jasa dari negara lain ke negara tersebut (impor). Keseimbangan dari kedua aktivitas tersebut bisa memberikan manfaat ataupun keuntungan bagi negara tersebut. Salah satu dari pengaruh keterbukaan perekonomian adalah pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam lingkup nasional, keterbukaan perekonomian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk lingkup regional, keterbukaan perekonomian suatu daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian daerah

### **2.4.1 Teori Permintaan dan Penawaran**

Nopirin (1996: 26-27) menjelaskan bahwa perdagangan di antara dua negara akan terjadi jika terdapat adanya perbedaan dalam permintaan dan penawaran. Perbedaan dalam permintaan dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam pendapatan dan selera. Untuk penawaran disebabkan adanya perbedaan dalam jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi, tingkat teknologi, dan eksternalitas. Anggapan atau asumsi utama yang dipergunakan dalam teori permintaan dan penawaran adalah:

- 1) Persaingan sempurna
- 2) Perubahan faktor produksi adalah tetap
- 3) Tidak ada biaya angkut



- 4) Kesempatan kerja penuh atau *full employment*
- 5) Tidak ada unsur perubahan teknologi
- 6) Produksi dengan ongkos yang menaik (*increasing cost of production*)
- 7) Tidak ada pemindahan capital.

#### **2.4.2. Kurva Kemungkinan Produksi dan Kurva Indiferen**

Pendekatan yang lebih spesifik untuk menggambarkan bagaimana pertukaran di antara dua negara dapat terjadi adalah melalui teori dalam kurva kemungkinan produksi atau *production possibility curve* (PPC) dan kurva indifferen (*indifference curve*) (Nopirin, 1996: 28-35). Kurva kemungkinan produksi merupakan kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dari faktor produksi dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu. Analisa dengan menggunakan pendekatan PPC ini selanjutnya akan digabungkan dengan penjelasan yang ditunjukkan melalui kurva indifferen untuk menjelaskan bentuk kemungkinan kombinasi yang paling efisien dalam menghasilkan sejumlah barang tertentu.

Pendekatan melalui PPC dan kurva indifferen menggunakan sejumlah asumsi di mana salah satunya adalah terpenuhinya keadaan ketenagakerjaan penuh atau *full employment*. Bentuk kurva yang diilustrasikan ditentukan oleh keadaan-keadaan yang disebut sebagai biaya oportunitas (*opportunity cost*).

## **2.5. Mekanisme Variabel-Variabel Penelitian**

Mekanisme yang dimaksudkan di sini adalah penjelasan secara teoritis mengenai pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Propinsi NTT. Variabel-variabel independen yang dimaksudkan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional terdiri atas keterbukaan perekonomian (EM), pajak daerah (RT), dan pengeluaran pembangunan. Adapun mengenai mekanisme dari masing-masing variabel independen tersebut dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Propinsi NTT dijelaskan berikut ini.

### **2.5.1. Pengaruh Keterbukaan Perekonomian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Keterbukaan perekonomian yang diartikan sebagai total antara nilai realisasi ekspor dan nilai realisasi impor merupakan manfaat yang diterima oleh masyarakat berupa pendapatan ataupun keuntungan. Apabila total antara ekspor dan impor semakin menghasilkan nilai positif yang semakin meningkat, maka tingkat keuntungan ataupun pendapatan yang diterima masyarakat akan semakin meningkat. Peningkatan pendapatan atau keuntungan tadi selanjutnya akan semakin mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian seperti konsumsi ataupun penyimpanan kekayaan dalam bentuk tabungan. Aktivitas perekonomian yang semakin meningkat kemudian akan berpengaruh meningkatnya pertumbuhan indikator perekonomian regional, yaitu pertumbuhan PDRB.

Keterbukaan perekonomian pun dapat menghasilkan total ekspor dan impor yang bernilai negatif atau defisit. Dalam kondisi seperti ini, apabila tingkat

keterbukaan perekonomian menghasilkan nilai total yang semakin turun, maka akan berpengaruh pada menurunnya manfaat yang diterima oleh masyarakat baik berupa keuntungan maupun pendapatan. Apabila nilai pendapatan ataupun keuntungan yang diterima dari keterbukaan perekonomian semakin berkurang, maka akan semakin berkurang pula aktivitas perekonomian baik dalam bentuk konsumsi maupun tabungan. Berkurangnya aktivitas perekonomian ini selanjutnya akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keterbukaan perekonomian berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Apabila keterbukaan perekonomian meningkat, maka akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi regional yang meningkat. Sebaliknya, apabila keterbukaan perekonomian semakin menurun, maka akan berpengaruh menyebabkan pertumbuhan ekonomi regional yang semakin menurun.

### **2.5.2. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan**

Berdasarkan fungsinya, pajak termasuk salah satu instrumen kebijakan fiskal yang ditujukan untuk mengatur atau berperan sebagai alat untuk mengendalikan perekonomian. Pengenaan pajak terhadap obyek yang dikenakan pajak akan berdampak mengurangi pendapatan masyarakat atau aktivitas konsumsi atas sejumlah barang maupun jasa. Apabila semakin besar pajak yang diterima oleh pemerintah, maka itu berarti semakin besar pula pengenaan pajak ke dalam perekonomian. Pengenaan pajak yang semakin tinggi atau meningkat akan berakibat berkurangnya kemampuan pendapatan untuk melakukan konsumsi atas

barang maupun jasa. Berkurangnya aktivitas perekonomian tadi selanjutnya akan berpengaruh mengurangi atau menurunkan laju pertumbuhan ekonomi.

Pada sisi sebaliknya, apabila penerimaan pajak pemerintah semakin berkurang, itu berarti dikarenakan pengenaan pajak ke dalam perekonomian juga berkurang. Jika pengenaan pajak ke dalam perekonomian berkurang, maka kemampuan pendapatan untuk dikonsumsi semakin meningkat. Selanjutnya, apabila aktivitas perekonomian dari kegiatan konsumsi barang maupun jasa meningkat, maka akan berpengaruh mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Apabila pajak daerah naik, maka akan berpengaruh menyebabkan pertumbuhan ekonomi regional menurun. Sebaliknya, apabila pajak daerah turun, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi regional meningkat.

### **2.5.3. Pengaruh Pengeluaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pengeluaran pembangunan merupakan bagian dari anggaran pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk menjalankan program-program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Program-program pembangunan ini ditujukan untuk menaikkan taraf kesejahteraan dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Jika alokasi anggaran pemerintah untuk pengeluaran pembangunan naik atau meningkat, maka akan mempengaruhi perbaikan kesejahteraan yang selanjutnya akan mendorong adanya peningkatan pendapatan.

Adanya peningkatan pendapatan masyarakat ini kemudian akan berpengaruh menaikkan aktivitas perekonomian seperti konsumsi atas sejumlah barang dan jasa. Peningkatan aktivitas perekonomian ini selanjutnya akan berpengaruh menaikkan laju pertumbuhan ekonomi regional.

Pada kondisi anggaran tertentu, seperti perubahan perencanaan dan target pembangunan, pengeluaran pembangunan dapat mengalami penurunan. Apabila pengeluaran pembangunan turun, maka akan berdampak mengurangi tingkat kesejahteraan dan sekaligus menurunkan pendapatan masyarakat. Kemudian, apabila pendapatan mengalami penurunan, maka selanjutnya akan berpengaruh mengurangi aktivitas perekonomian. Berkurangnya aktivitas perekonomian tadi akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan ekonomi regional.

Berdasarkan penjelasan di atas, variabel pengeluarann pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila pengeluaran pembangunan meningkat, maka akan berpengaruh meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila pengeluaran pembangunan turun, maka akan berpengaruh menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi turun.

## **2.6. Studi Terkait**

Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang pembahasannya berkaitan dengan pendapatan nasional dan laju pendapatan nasional. Pada prinsipnya, teori pendapatan di tingkat regional memiliki kesamaan konsep dengan teori pendapatan di tingkat nasional, kecuali lingkup atau batasan wilayah. Teori dasar yang digunakan bersandar pada Teori Keynes dalam *The*

*General Theory* yang menjelaskan bahwa total pendapatan dalam suatu perekonomian sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga (*household*), perusahaan (*private sector*), dan pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya. Semakin besar dari masing-masing institusi perekonomian tadi mengeluarkan atau membelanjakan pendapatan, maka akan semakin besar pula output yang dihasilkan, termasuk semakin banyak pula tenaga kerja yang digunakan.

Kebijakan fiskal memiliki komponen seperti penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dan pengeluaran pemerintah. Untuk pengeluaran pemerintah, ada dua macam jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin (operasional) dan pengeluaran pembangunan. Kebijakan fiskal seperti pajak memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap besarnya konsumsi. Apabila dilihat dari fungsi konsumsi yang dituliskan:

$$C = C(Y - T) \dots\dots\dots (1.1)$$

Berdasarkan fungsi konsumsi pada persamaan (1.1), besarnya pendapatan yang dikurangi pajak akan menentukan besarnya konsumsi. Dalam hal ini, pendapatan yang semakin tinggi akan menyebabkan besarnya konsumsi yang semakin tinggi pula. Belanja pemerintah akan menentukan besarnya belanja masyarakat yang selanjutnya akan menentukan besarnya konsumsi masyarakat. Besarnya konsumsi masyarakat tadi kemudian akan menentukan pula besarnya pendapatan, yaitu sebagai sumber penerimaan dari pihak lain seperti sektor swasta (*private sector*).

Besarnya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran masyarakat baik untuk konsumsi (rumah tangga) maupun untuk investasi (swasta). Apabila kebijakan fiskal dimaksudkan untuk mengurangi atau memotong beban pajak, maka pemotongan pajak tersebut akan mendorong kenaikan penawaran agregat, yaitu dengan ditambahkannya insentif berupa tambahan keuntungan kepada pengusaha ataupun pendapatan kepada pekerja. Kenaikan insentif akibat adanya pemotongan pajak ini sekaligus akan memperbesar pula permintaan agregat atau konsumsi agregat baik yang berasal dari sektor rumah tangga maupun sektor swasta.

Dari sudut positif jika pajak pemerintah mengalami kenaikan menyebabkan pengeluaran pemerintah dan permintaan aggregate akan mengalami kenaikan sehingga pendapatan juga naik maka pertumbuhan ekonomi pun mengalami kenaikan, sebaliknya jika pajak pemerintah naik menyebabkan konsumsi dan pendapatan juga mengalami penurunan hal ini akan mempengaruhi penurunan laju pertumbuhan ekonomi.

Peran pemerintah dalam suatu perekonomian yang lebih terbuka, akan jauh lebih besar (Poot, 1999: 8-9). Hal ini dikarenakan pihak pemerintah dalam bentuk perekonomian yang lebih terbuka akan cenderung berperan seolah sebagai penjamin (*insurer*), seperti menjadi pelindung bagi beberapa kelompok, terutama kelompok usaha kecil dan menengah terhadap apa yang mereka sebut resiko eksternal berupa kebangkrutan usaha. Suatu perekonomian terbuka tentunya sangat rawan dengan segala bentuk resiko usaha yang membuat perusahaan menjadi bangkrut atau sulit untuk berkembang.

Pengaruh dari kebijakan fiskal sehubungan dengan beberapa pembelanjaan pemerintah (*government spending*) dalam model pertumbuhan endogen bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi. Dengan membuat anggapan bahwa suatu perekonomian terdiri atas aktivitas pengeluaran berupa konsumsi rumah tangga, konsumsi swasta (investasi), dan belanja pemerintah. Model fungsi produksi untuk menjelaskan pengaruh fiskal pemerintah dalam suatu pertumbuhan endogen menurut Gray dan Stone (2006) dapat dituliskan sebagai berikut (Bania, et al, 2006: 5):

$$y = A.k^{\alpha}.g^{\beta} \dots\dots\dots (1.2)$$

di mana:

- y = output
- A = variabel konstan atau konstanta
- k = kapital swasta (*private capital*)
- g = sektor publik dari pemerintah.

Dari model yang dikembangkan oleh Gray dan Stone (2006) tersebut, output pada persamaan (1.2) menyatakan besarnya pendapatan nasional. Kapital yang dimiliki oleh swasta adalah sejumlah pembelanjaan yang dikeluarkan oleh sektor swasta dalam rangka meningkatkan keuntungan. Peran pemerintah di sini diartikan sebagai faktor produksi tambahan yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap perubahan pada peningkatan pendapatan (y). Pada persamaan (1.2), peran pemerintah diperlihatkan melalui variabel g, yaitu sektor publik. Konsumsi rumah tangga dapat diartikan sebagai input produksi karena mendorong terjadinya permintaan atas sejumlah barang-barang input yang



selanjutnya digunakan untuk menghasilkan output ( $y$ ). Dengan demikian, apabila ditambahkan komponen konsumsi rumah tangga, maka diperoleh persamaannya adalah:

$$y = A.k^{\alpha}.g^{\beta}.c^{\gamma} \dots\dots\dots (1.3)$$

di mana:

- $y$  = output
- $A$  = variabel konstan atau konstanta
- $k$  = kapital swasta (*private capital*)
- $g$  = sektor publik dari pemerintah
- $c$  = sektor rumah tangga
- $\alpha$  = parameter dari variabel  $k$
- $\beta$  = parameter dari variabel  $g$
- $\gamma$  = parameter dari variabel  $c$ .

Untuk sektor publik dari pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu variabel penerimaan dan variabel pengeluaran.

Penelitian ini mengadopsikan model pertumbuhan ekonomi endogen dari Gray dan Stone (2006) seperti yang diaplikasikan oleh (Bania, et al, 2006) pada persamaan (1.3). Modifikasi model dilakukan dengan menghilangkan variabel kapital swasta ( $k$ ). Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa lingkup penelitian adalah regional di mana tidak semua daerah terutama di KTI yang merata dalam memobilisasi kapital. Adapun variabel dependen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Untuk variabel-variabel independen terdiri terdiri atas keterbukaan perekonomian di Propinsi NTT, total realisasi penerimaan pajak daerah pemerintah Propinsi NTT, dan total realisasi pengeluaran pembangunan pemerintah Propinsi NTT. Model pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan variabel-variabel tersebut merupakan aplikasi dari model yang digunakan oleh Dowling dan Hiemenz (1983).